

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI PAPUA

Rizka Saptarinur ^{*1}, Siti Rofingatun(sitiro@yahoo.co.id)²

*^{*1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Cenderawasih
Corresponding Author

Abstract

This Study aims to find out how big the Performance-Based Budget, Financial Reporting System, Accounting Control, and Accountability of Government Agency Performance at the Papua Province BPMP is both simultaneously and partially. This Research is a research with a Quantitative Descriptive Approach. the type of data used is quantitative data. The population in this study is all employees who are assembled in the sakip team, and are involved in the financial process, the preparation of program performance drafts, budgets, and performance reporting and evaluation. This study included a survey study in which 70 samples were saturated samples and used questionnaires as a tool for collecting data. Data Analyzed using multiple regression analysis with the help of the SPSS Version 25 program.

The results showed that the Performance-Based Budget variable partially had a Significant Positive Effect on The Accountability of Government Agency Performance. Meanwhile, the Financial Reporting System Variables have no Significant Effect on the Accountability of Government Agency Performance. Accounting Control Has a Significant Positive Effect on Accountability of Government Agency Performance at the Papua Provincial BPMP.

Keywords: *Performance-Based Budgets; Financial Reporting System; Accounting Control; Accountability of Government Agency Performance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan, Pengendalian Akuntansi, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPMP Provinsi Papua baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini merupakan penelitian dengan Pendekatan Deskriptif Kuantitatif. jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang tergabung dalam tim sakip, dan terlibat dalam proses keuangan, penyusunan rancangan program kinerja, anggaran, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Penelitian ini termasuk penelitian survei dimana 70 sampel merupakan sampel jenuh dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Variabel Sistem Pelaporan Keuangan tidak berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengendalian Akuntansi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPMP Provinsi Papua.

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja; Sistem Pelaporan Keuangan; Pengendalian Akuntansi; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pendahuluan

Penganggaran berbasis kinerja yang baik oleh instansi pemerintah dan pemantauan yang optimal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan mengoptimalkan kinerja manajemen operasi pemerintah. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan direvisi kembali dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) mengalokasikan sumber daya untuk program maupun unit organisasi dan menggunakan pengukuran kinerja sebagai indikator kinerja organisasi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada awal tahun 2021 melakukan revitalisasi (penggabungan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada di bawah jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terhadap 34 Provinsi. Hasilnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan BP-PAUD di merger menjadi satu UPT dan melakukan perubahan nama serta fungsi LPMP menjadi BPMP atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang merupakan UPT Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang berada di Setiap Provinsi di Indonesia yang didapati telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja. Pencapaian (SK) Sasaran Kegiatan, yaitu Terwujudnya Tata kelola LPMP Papua Yang Baik dengan Nilai Minimal 80 pada tahun 2019, terealisasi 70,77, masuk dalam kategori BB dengan interpretasi yaitu sangat baik, akuntabel, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Ada beberapa hambatan terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada LPMP Provinsi papua, diantaranya: (1) Belum efektifnya kerja Tim SAKIP ditandai dengan masing-masing anggota belum mandiri dan sinergi, (2) Belum berjalan maksimalnya rapat evaluasi bulanan sebagai wadah menuju perbaikan, dan (3) Belum seluruh indikator penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP terpenuhi.

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalannya dalam memenuhi misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem akuntabilitas yang teratur. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan keterbukaan kepada pemangku kepentingan dalam kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah. Sistem pelaporan mencerminkan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kinerja semua kegiatan dan sumber daya yang harus dijelaskan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat memantau dan mengontrol kinerja manajer dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau pekerjaan Pusat Pertanggungjawaban. Laporan harus menunjukkan hasil kerja instansi yang bertanggung jawab dan anggarannya sehingga anggaran dapat dilihat (Devika Diah, 2019). Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Pada BPMP Provinsi Papua terdapat tim SPI atau Satuan Pengawasan Internal yang berfungsi untuk

mengendalikan transaksi keuangan dan menggunakan buku kas umum dalam mencatat transaksi keluar dan masuknya kas pada setiap kegiatan atau program kerja.

Fenomena yang terjadi saat ini mengenai masalah akuntabilitas, di Indonesia terdapat beberapa masalah akuntabilitas kinerja, yaitu kinerja pegawai negeri sipil atau PNS sedang mendapat sorotan sebab penggunaan biaya pemerintah yang tinggi secara tidak tepat. Dalam mendorong akuntabilitas kinerja yang baik instansi pemerintah, BPMP Papua diminta untuk terus mengupayakan peningkatan kinerjanya. Hal ini disebabkan kurangnya akuntabilitas kinerja BPMP Papua. Hal ini diyakini menjadi masalah yang sering terjadi selama ini, maka dari itu penulis berspekulasi bahwa hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya dari anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi yang belum berorientasi pada hasil akhir.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan cara membandingkan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja, hasilnya LPMP Papua pada tahun 2019 dianggap belum Efisien (*Inefisiensi -10,25*) dalam Penggunaan Anggaran dikarenakan (1) Kelebihan belanja bahan dan akomodasi kegiatan disebabkan jumlah peserta kegiatan yang hadir lebih sedikit dibanding target, (2) Biaya perjalanan di Papua sering melebihi Standar Biaya Umum (SBU), dan (3) Struktur anggaran belum proporsional.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan judul penelitian Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua.

Kajian Pustaka

Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah harus memiliki renstra (Rencana Strategik) yang disusun dengan objektif yang melibatkan seluruh komponen pemerintahan. Sistem ini diharapkan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur kinerja keuangan yang tercermin dalam anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, aspek keuangan antara lain diukur dalam bentuk ABK (penganggaran berbasis kinerja).

Penganggaran berbasis kinerja kini memudahkan pengendalian birokrasi terkait prinsip efektivitas, mengefisienkan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program/proyek dan pendapatan infrastruktur publik, serta transparansi mendorong akuntabilitas pemerintah. Melakukan penghematan uang negara tanpa mengabaikan Prinsip profesionalisme (Riawan Tjandra 2009:44).

Sistem Pelaporan Keuangan

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP: 2000) mengatakan bahwa laporan yang baik terletak pada laporan yang harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan umpan balik (feedback) diperlukan untuk mengukur kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan rencana atau anggaran sehingga manajemen dapat mengetahui tentang pelaksanaan rencana atau tujuan.

Setiap entitas pelapor wajib menggambarkan secara sistematis dan terstruktur upaya dan pencapaian yang telah dilakukan dalam melaksanakan kegiatan selama periode pelaporan untuk tujuan akuntabilitas, pengendalian, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan penilaian kinerja (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Kerangka Konseptual; 2010).

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian yang efektif meluas ke semua operasi entitas, termasuk semua unit, semua fungsi, semua departemen, semua wilayah, dan semua individu. Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek transaksi keuangan, termasuk pembayaran tunai, penerimaan kas, arus kas, investasi yang bijaksana, dan perlindungan dana dari penyalahgunaan. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah suatu perencanaan, prosedur, dan sistem pelaporan yang berkaitan dengan aset atau harta organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah harus sesuai dengan undang-undang. Laporan akuntabilitas yang diterima sehubungan dengan pemenuhan kewajiban kepada pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik wajib akurat dan wajar. Namun, kurangnya kepatuhan dan kepedulian terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan sumber data primer. Lokasi penelitian dilaksanakan di BPMP Provinsi Papua. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terhimpun dalam tim saki, serta terlibat dalam proses keuangan, penyusunan draft kinerja program, anggaran, serta pelaporan dan evaluasi kinerja serta beberapa staf sebanyak 70 orang pegawai yang bekerja pada BPMP Papua. Penelitian ini termasuk penelitian survei dimana 70 sampel merupakan sampel jenuh dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya, teknik dalam pemberian skor yang digunakan adalah Teknik Skala Likert. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS Versi 25.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Validitas

Hasil uji validitas, seluruh pernyataan variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1), Sistem Pelaporan Keuangan (X2), Pengendalian Akuntansi (X3), dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil r hitung menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam setiap variabel berada di atas 0.2423. Dengan demikian r hitung $\geq r$ tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 4.1
Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
	Cronbach's Alpha	Keterangan
Anggaran	0.944	<i>Reliable</i>
Pelaporan	0.926	<i>Reliable</i>
Pengendalian	0.878	<i>Reliable</i>
AK_Kinerja	0.915	<i>Reliable</i>

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai Cronbach Alpha untuk variabel anggaran adalah 0.944 dengan kategori reliabilitas luar biasa, variabel sistem pelaporan keuangan 0,926 dengan kategori reliabilitas luar biasa, pengendalian akuntansi 0.878 dengan kategori reliabilitas tinggi dan akuntabilitas kinerja 0.915 dengan kategori reliabilitas luar biasa.

Tabel 4.2
Hasil Uji Regresi

Coefficientsa							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
		1	(Constant)	11.473	2.916		
	Anggaran	0.326	0.106	0.504		3.063	0.003
	Pelaporan	-0.158	0.211	-0.143		-0.748	0.457
	Pengendalian	0.526	0.184	0.412		2.858	0.006

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 11.473 + 0.236 X1 - 0.158 X2 + 0.526X3 + \varepsilon$$

Artinya:

- Jika semua variabel bebas bernilai 0 (nol), maka nilai variabel terikat adalah 11.473
- X1 (Anggaran berbasis kinerja) terhadap Y (Akuntabilitas Kinerja). Nilai koefisien X1 adalah 0.326, artinya setiap kenaikan anggaran berbasis kinerja sebesar satu satuan akan diikuti dengan kenaikan variabel Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.326. Dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dalam regresi adalah konstan.
- X2 (sistem pelaporan keuangan) terhadap Y (Akuntabilitas Kinerja) Nilai koefisien X2 (sistem pelaporan keuangan) adalah -0.158. artinya setiap kenaikan variabel sistem pelaporan keuangan sebesar satu satuan akan diikuti oleh penurunan variabel

Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.158. dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dalam regresi adalah konstan.

- d. X3 (Pengendalian Akuntansi) terhadap Y (Akuntabilitas Kinerja) Nilai koefisien X3 (Pengendalian Akuntansi) adalah 0.526. artinya setiap penurunan nilai variabel pengendalian Akuntansi sebesar satu satuan akan diikuti dengan kenaikan nilai variabel Y Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.526, dengan asumsi semua variabel bebas dalam regresi adalah konstan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 ^a	0.519	0.495	3.28279
a. Predictors: (Constant), Pengendalian, Anggaran, Pelaporan				
b. Dependent Variable: AK_Kinerja				

Sumber : data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diperoleh R Square sebesar 0.519^a. Artinya variabel - variabel bebas Anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi berpengaruh sebesar 51,9% terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan sisanya 48,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.4
Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.473	2.916		3.934	0.000
	Anggaran	0.326	0.106	0.504	3.063	0.003
	Pelaporan	-0.158	0.211	-0.143	-0.748	0.457
	Pengendalian	0.526	0.184	0.412	2.858	0.006

Sumber : Data Diolah (2022)

Interpretasi:

1. Anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Terlihat pada kolom *Coefficients* variabel X1 terdapat nilai sig. = 0.003 dan $t_{hitung} = 3.063$ Sehingga nilai sig < alpha (0.05) dan $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ (2.001). Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel dan nilai sig. lebih kecil dari 0.005, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

2. Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja terlihat pada kolom *Coefficients* variabel X2 terdapat nilai sig. = 0.457 dan $t_{hitung} = -0.748$. Sehingga nilai sig < alpha (0.05), $|t_{hitung}| < t_{tabel}$ (2.001). Karena t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} , maka H_a ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.
3. Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja, Terlihat pada kolom *Coefficients* variabel X3 terdapat nilai sig. = 0.006 dan $t_{hitung} = 2.858$ atau nilai sig < alpha (0.05) dan $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ (2.001). Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan nilai sig. lebih kecil dari 0.005, maka H_a ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja.

Uji Simultan

Tabel 4.5
Hasil Uji Simultan

ANOVAa						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	697.131	3	232.377	21.563	.000 ^b
	Residual	646.603	60	10.777		
	Total	1343.734	63			

Sumber : data diolah (2022)

Dari tabel diatas diperoleh nilai sig. 0.000 dan $F_{hitung} = 21.563$. Karena nilai sig < alpha (0.05) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ (2,6597) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara simultan Anggaran berbasis kinerja, sistem Pelaporan Keuangan dan pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Pembahasan

Anggaran Berbasis Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai sig. = 0.003 dan $t_{hitung} = 3.063$ Sehingga nilai sig < alpha (0.05) dan $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ (2.001) maka H_a ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Hasil Penelitian ini didukung oleh Teori bahwa Akuntabilitas kinerja yang dilihat dari sistem anggaran berbasis kinerja ini sudah terlaksanakan baik sesuai amanat UU No.17 Tahun 2003 karena sudah sejalan dengan tujuan (bisa diraih) dan menggambarkan hasil yang berikatan kepada semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja.

BPMP Provinsi Papua berhasil mengoptimalkan realisasi anggaran tahun 2020 meskipun di tengah pandemi covid 19 Dari segi penyerapan dan pemanfaatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi terealisasi sebesar 96,55% (Rp.35.296.045.200) dari total anggaran (Rp.36.556.653.000). Dengan demikian sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil kerja yang makin diimplementasi dengan sangat benar, maka juga semakin

meningkatkan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini, maka makin baiknya penerapan anggaran di BPMP Provinsi Papua karena dari keberhasilan dalam melaksanakan sistem anggaran terhadap kinerja yang lebih baik sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Silvia, 2021) menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai $\text{sig.} = 0.457$ dan $t_{hitung} = -0.748$. Sehingga nilai $\text{sig} < \alpha (0.05)$, $|t_{hitung}| > t_{tabel} (2.001)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya sistem pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Teori Keagenan oleh (Jensen and Meckling, 1976) menjelaskan bahwa pemerintah harus menjadi lebih Akuntabel dan Transparan agar Informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah. Namun Pelaporan Keuangan Pada BPMP Provinsi Papua yang dibuat per trimester atau per tiga bulan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Belum diungkapkan secara utuh dan tidak semua kalangan masyarakat umum dapat mengakses dan memahami laporan keuangan yang di publikasikan oleh BPMP pada Laman *Website Online*. Dan juga dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah/kendala seperti: (a) Lemahnya Pembinaan pegawai dalam melakukan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. (b) Masih adanya pegawai yang tidak menjunjung integritas dan etika serta tanggung jawab atas sistem pelaporan keuangan di kantor tersebut.

Hasil penelitian ini tidak signifikan kemungkinan disebabkan oleh adanya kondisi di mana pemerintah belum mampu memaksimalkan sistem pelaporan yang tersedia. Berdasarkan data penelitian ini, sistem pelaporan BPMP seharusnya menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas untuk kepentingan pihak internal dan eksternal entitas (Halim 2007:326).

Dengan demikian hasil penelitian ini membantah hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Wahdatul et al., 2016). namun relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Hafzhan, 2021) bahwa sistem pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai $\text{sig.} = 0.006$ dan $t_{hitung} = 2.858$ atau nilai $\text{sig} < \alpha (0.05)$ dan $|t_{hitung}| > t_{tabel} (2.001)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja.

Hasil Penelitian ini didukung oleh Teori (Muhammad Hafzhan,2021) bahwa pengendalian akuntansi yang baik maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian Akuntansi dilakukan agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai

dengan ketentuan – ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan (*Corrective*) jika terdapat penyimpangan – penyimpangan (deviasi).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi yang dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Papua dinilai baik. Semakin baik pengendalian akuntansi maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPMP Provinsi Papua. Pengendalian akuntansi yang baik menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sistem pelaporan sehingga mampu mengembangkan akuntabilitas kerjanya dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Anastasia, 2018) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig. 0.000 dan $F_{hitung} = 21.563$. Karena nilai sig < alpha (0.05) dan $F_{hitung} > F_{tabel} (2,6597)$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara simultan Anggaran berbasis kinerja, sistem Pelaporan Keuangan dan pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Hasil Penelitian ini didukung oleh Teori (Muhammad Hafzhan, 2021) bahwa jika kenaikan penganggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi yang semakin baik, maka akan menentukan naiknya akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang dibuat telah memenuhi kriteria yang diperlukan sehingga anggaran bisa tersalurkan jelas dan spesifik serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti yang diperlukan dalam lingkup pertanggungjawabannya.

Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dengan adanya anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi yang jelas dapat meningkatkan kinerja pegawai khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Hafzhan, 2021) bahwa secara simultan variabel anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
2. Sistem pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
3. Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja.
4. Anggaran berbasis kinerja, sistem Pelaporan Keuangan dan pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji

koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan keuangan dan pengendalian akuntansi berpengaruh sebesar 51,9% terhadap akuntabilitas kinerja.

Daftar Pustaka

- Ali, A., Agusti, R., & Riani, I. (2015). Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34060.
- Anastasia, D. R. (2018). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 13(1), 15–27.
- Anthony. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen (II)*. Salemba Empat.
- Bastian. (2006). *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Salemba Empat, 2006.
- Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (ketiga)*. Erlangga.
- BPKP. (2005). Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP- 911/K/JF/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan. 1–41.
- BPKP. (2011). Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1392/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sekretariat Utama BPKP.
- Devika Diah. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444.
- Eko Setiawan. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di SKPD Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 33, 1–14.
- Eny Kusriani. (2020). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kesulitan tujuan anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus).
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Prov. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 670–684.
- Ghozali, I. (2018). Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. In *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Halim. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah (4th ed.)*.
- Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim dan Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Herry. (2009). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Bumi Aksara.
- Husein Umar. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka.

- Indraswari, K. (2010). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah.
- Jensen and Meckling. (1976). theory of firm: manajerial behavior, agency costs and ownership structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696.
- Laporan Kinerja LPMP Papua. (2019). Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor, 53,
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta : Andi, 2002.
- Miriam Budiardjo. (1994). Demokrasi di Indonesia demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 1994.
- Muhammad Hafzhan. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. 6.
- Mukhofifah, U., Migunani, & Hidayat, A. (2016). Perancangan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Web. *IJSE-Indonesian Journal On Software Engineering*, 2(1), 16.
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Padapemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 327–340.
- Netty. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi.
- Rencana Strategis LPMP Papua. (2020). Laporan Kinerja Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Riawan Tjandra. (2009). Hukum Keuangan Negara. Grasindo.
- Riwandani, A. (n.d.). pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Studi Kasus Pada BPKD – Kabupaten Bandung Barat). 1–16.
- Rona Efrizar. (2017). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporanterhap kinerja manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1726–1740.
- Sekaran. (2006). Metode Penelitian Bisnis (4th ed.). Salemba Empat.
- Selviani, D. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *Land Journal*, 1(2), 117–124.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulistio, E. B. (2010). Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah. *Sosialita*, 1(1), 1–13.
- Urip Santoso. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. 20.
- Wahdatul, L., Rahayu, S., Dillak, V. J., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Telkom, U. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung the Influence of Performance – Based Budgeting and Financial Reporting System To the Accountability of the Local Governme. *E-Proceeding of Management*, 3(2), 1560–1565.
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(1), 47–56.
- Yushita. (2010). earning management dalam hubungan keagenan. VIII(2005), 1–1